

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

R A P A T 80.

Hari Selasa, 18 Oktober 1955.

(Jam panggilan 09.00).



Pengumuman Sekretariat — Usul-usul perubahan tjara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat setelah sesudah tanggal 15 Oktober 1955 — Daftar surat-surat masuk.

Ketua: Mr S rtono.

Sekretaris: Mr Roesli

Jang hadir 149 anggota:

B. M. Diah, Ahmad Nino Hadjarati, Ir Pangeran Mohd Noor, Dr J. L. W. R. Rhamtey alias Abdurrachman Abdul Salam, M. A. Pellaupesay, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Rekso-dipoero, Ardiwinangun, Mr R. Boedisoesetya, Mr Djaidin Purba, Ngeradjai Meliala, Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd. Gh. A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A. A. Rival, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, Mr Assa'at, Baharungjah Sutan Indra, H. Saifuddin Zuhri, P. M. Tangkilsan, Zainul Baharuddin, A. R. Baswedan, Bebasa Daeng Lala, Anwar Harjono, Bachtaroeddin, Djoko Sudjono, S. Hadikusumo, Moesata Poeng Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Krisubanu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Maizir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwasugito, Sab lal Nasjad, I Gusti Gde Raka, Rangkojo Rasuna Ssid, S. Sardjono, Mr Sunarto, Djohan Sjahrurah, Sudjono Djajoprasitno, Suhardjo, R. Sumarto Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, R. P. Suenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susikowati, Mustafa Kamil Usman, Gogo Rafiudin Sandjadirdja, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nui el Ibrahimy, Mr S rtono, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Teuku Juaidi Muda Dalam, Njonja Moedikdik, Noeroelish, Njonja Suwarti, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Rh. Kusnan, K. Werdjo, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wirosubroto, Mohd Tauhid, Siauw Gok Tihan, Tony Wen, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moela, I R. Loba, M. Yuman Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjikwan Amelz, Sutan Said Ali, H. R. B. Abdul Wahid Baari, Amri Jara, M. Padang, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olli, A. S. Bochimid, I B. P. Manuaba, A. C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo, E. Jamco, Arso Boeratoatmodjo, R. T. Surjaningprodjo, Said Bahreis, R. Saroso Harsono, J. Langkat, R. Bagioadi Muntjanegara, Mohd

Rap. 0.

Mahfud dan Mohd Zainal Akim, Mohd Ersat Trunodjojo, O. K. Rimali, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K. H. Ahmad Azhari, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhammad Hasan R. Emor Djajadinata, S. Mangunsarkoro Ma Maramis, H. Z. Arifin, A. I. Jusuf, R. Idi, Abdul Samad K. A. Djohar, Dr. Sultan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kusu-mojudo, Dr. D. S. Diapari, Hasan Basri, Idham Chalid, I. A. Moelis, Rasjid Sultan Racha Ema Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, W. M. N. I. Iuwen-huysen, R. Djerman Prawitawinata, R. uparno, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, M. N. wawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, M. H. Loek-man, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatallisto, Emon Bratadwidjaja, R. Abdurachman Wangsa-dikaria, Abulhajat, Gde Ngurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara.

Wakil Pemerintah: Asraruddin, Menteri Muda Perhubungan.

Ketua Rapat saja huka.

Saudara-saudara, saya beritahukan bahwa jumlah anggota yang hadir ada 134.

Seorang saja persilakan lebih dulu Saudara Sekretaris untuk memberikan pemberitaan tentang surat-surat yang masuk.

Sekarang Saudara-saudara jumlah surat-surat masuk pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 1955 ada 5 puzjuk^{*)}, yang sebagian besar diteruskan kepada Sekelompok yang bersangkutan.

Surat masuk yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1955, perihal penyelesaian pekerjaan perundang-undangan Kabinet-kabinet yang lampau.

Saya beritahukan dengan hormat bahwa Kabinet pada rapat yang ke-13 tanggal 7 Oktober 1955 telah memutuskan untuk mempertahankan beberapa Undang-undang yang dibuat oleh Kabinet-kabinet yang lampau, yang masing-masing telah disampaikan dengan amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam lapangan Kementerian Dalam Negeri:
 1. Rantjangan Undang-undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. (Amanat Presiden tanggal 6-4-1954 o. 1122 HK/54)
 2. Rantjangan Undang-undang tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. (Amanat Presiden tanggal 6-4-1954 o. 1123 HK/54)
 3. Rantjangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam ling-

^{*)} Lihat daftar terlampir.

kungan Propinsi Sumatera Tengah. (Amanat Presiden tanggal 6-4-1954 No. 1126/HK/54).

4. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakjat/Dewan Pemerintahan Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya sebagai Undang-undang. (Amanat Presiden tanggal 25-6-1954 No. 2027/HK/54).
5. Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan Batas-batas Kota Besar Madiun dan Kabupaten Madiun. (Amanat Presiden tanggal 31-12-1954 No. 1345/HK/54).
6. Rantjangan Undang-undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 (L.N. No. 31/1950) tentang Susunan Pemerintahan dalam daerah Kota Djakarta Raya dan Pembubaran „Gewest Djakarta dan sekitarnya” sebagai Undang-undang. (Amanat Presiden tanggal 5-7-1954 No. 2166/HK/54).
7. Rantjangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Amanat Presiden tanggal 6-4-1954 No. 1124/HK/54).
8. Rantjangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Amanat Presiden tanggal 6-4-1954 No. 1125/HK/54).
9. Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Djawa. (Amanat Presiden tanggal 19-7-1954 No. 2019/HK/55).

II. Dalam lapangan Kementerian Kesehatan:

Rantjangan Undang-undang tentang Pemberian Dr Soegiri Pemimpin Rumah Sakit „Baju-Asih” di Purwakarta dari pembayaran penggantian uang sebesar Rp. 14.189,17 yang digelapkan oleh pegawai kasja Muchtar. (Amanat Presiden tanggal 23-9-1954 No. 2017/HK/54)

Berhubung dengan itu saja harap supaya pembicara mengenal rantjangan-rantjangan Undang-undang tersebut diatas dapat dilandjutkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Kedua, surat dari Pengurus Besar Perindra, tanggal 18 Oktober 1955, perihal penggantian Ir Dipokusumo sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Dipermahtumkan dengan hormat, bahwa untuk ganti Ir S. Dipokusumo, anggota Dewan Perwakilan Rakjat Fraksi Parindra, yang telah berhenti se-



Rapat 80.

bagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah Saudara Sjamsuddin partikelir, bertempat tinggal di Tandjung Pinaang Riau

Acte van bekenndheid akan menjusul. Menda-
hului apa yang tertjatat didalam acte van bekennd-
heid itu, kami dapat mengabarkan, bahwa saudara
Sjamsuddin tersebut telah bertumur lebih dari pada
25 tahun.

Ketiga, surat dari Saudara Sunario anggota
Dewan Perwakilan Rakyat minta dengan hormat
supaja dimasukkan didalam Seksi Luar negeri.
Sekian.



Ketua: Saudara-saudara, berhubungan dengan
surat dari Pengurus Besar Parindra yang meng-
usulkan supaja Saudara Sjamsuddin, partikelir
bertempat-tinggal di Tandjung Pinaang supaja
ditetapkan menjadi tjalon pengganti yang akan
diusulkan kepada Pemerintah yaitu sebagai tjalon
pengganti Saudara Ir Dipokusumo. Karena kemarin
Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengadakan ke-
putusan, yaitu menjatakan adanya lowongan ber-
hubungan dengan berhentinja Saudara Dipokusumo,
maka saya usulkan supaja Dewan Perwakilan
Rakyat menerima usul dari pada Pengurus Besar
Parindra dan mengusulkan kepada Pemerintah
Saudara Sjamsuddin tersebut dalam surat ini se-
bagai tjalon pengganti Saudara Dipokusumo

Dapatkah ini disetujui?

(R a p a t setuju.)

Berkenaan dengan permintaan Saudara Sunario
supaja ditempatkan dalam Seksi Luar Negeri,
saya kira ulang tidak berkeberatan.

(R a p a t Setuju)

Mari lah, Saudara-saudara sekarang kita me-
ninggikan kepada atjara buas pagi hari ini, ialah
membicarakan usul-usul perubahan mengenai
atjara-atjara yang telah ditetapkan oleh Panitia
Permunjawaratan.

Tadi pihak Pemerintah menjatakan ingin me-
ngemukakan pendapatnja mengenai hal ini Saya
persilakan.

Azaruddin, Menteri Muda P erhubungan Sau-
dara Ketua, sebelum atjara mengenai perubahan
usul-usul atjara ini dibicarakan, ingin saya me-
njabarkan keluendak dari pada Pemerintah, ialah
bahwa Pemerintah akan menjampukan dja-
wabannja atas pemandangan umum babak I pada
hari Senin jang akan datang.

Ketua: Saudara-saudara, berhubungan dengan
permintaan Pemerintah supaja dja'waban Peme-
rintah atas pemandangan umum babak I diberika-
kan pada hari Senin tanggal 24 maka saya usul-
kan kepada sidang supaja atjara jang telah dite-

Rapat 80.

tapkan oleh Panitia Permusjawaratan itu supaya diubah sedemikian rupa, sehingga apa yang telah ditetapkan hari Djum'at tanggal 21 itu digeserkan 3 hari kemuka.

Djadi semula keterangan Pemerintah itu akan diadakan pada tanggal 21; sekarang dijawab Pemerintah akan diberikan tanggal 24. Berhubungan dengan itu selogianja pemandangan umum babak II diberikan 3 hari sesudah tanggal 24 yaitu hari Djum'at tanggal 28 yang akan datang. Tetapi hari Djum'at itu hari besar sedangkan hari Sabtu hari yang kurang baik buat mengadakan rapat-rapat. Djadi selogianja diadakan pada hari Senin tanggal 31 Oktober yang akan datang. Djadi pemandangan umum babak II akan dilanjutkan hari Senin pagi-sore diteruskan hari Selasa pagi-sore dan kalau perlu hari Rabu pagi-sore.

Kalau Saudara-saudara setuju, atjara yang ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan ini tetap sampai tanggal 2 Oktober tetapi dengan perubahan tersebut.

Hari Kamis tanggal 27 itu bagaimana, apakah tetap saja? Ini berhubungan dengan menghadapi hari Maulud Nabi.

(Seorang anggota: Hari Kamis itu vrij dia!)

Hari Sabtu tanggal 22 Oktober, Senin, Selasa, Rabu, Djum'at, Sabtu 29 Oktober ini tidak ada sidang, semua yang menjelip hari Kamis.

Tetapi sekarang ada diserukan untuk tidak mengadakan sidang pada hari Kamis itu.

Djadi pemandangan umum babak II saya harap benar-benar Saudara-saudara bisa menyelesaikan mulai hari Senin itu dalam hal ini tidak ada prioritas apa-apa.

Djadi semua yang terdaftar untuk pemandangan umum babak II supaya sudah siap pada hari Senin itu agar segala sesuatu menjadi lancar jalannya.

Saya ulangi lagi. Djadi atjara yang berlaku sampai tanggal 2 Oktober, yaitu yang telah ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan dengan perubahan bahwa pada hari Djum'at tanggal 21 Oktober tidak ada rapat, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober juga tidak ada rapat.

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober dijawab Pemerintah, pada hari Selasa berikutnya sampai dengan hari Ahad tidak ada rapat.

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober, pemandangan umum babak kedua, kalau perlu sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Nopember '55.

Sudah terang, Saudara-saudara?

Z. Baharuddin: Bagaimana kalau tidak selesai pada hari Rabu itu?

Rapat 80.

Ket : Jika demikian baiklah kita sediakan hari Kamis malam atau hari Jum'at berikutnya. Jadi Kamis malam atau hari 3 Nopember '55 kita sediakan buat pemondongan umum babak kedua kalau perlu.

Saudara-saudara rapat Panitia Permusjawaratan tetap akan diadakan pada tanggal 21 Oktober '55. Apakah tidak ada yang berkeberatan?

(Rapat : Tidak ada)

Saudara-saudara selesaikanlah agar bisa buat hari ini, maka dengan ini rapat saya tutup.

Rapat ditutup jam 09.49



Rapat 80.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 10 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	10/10	17853 3 surat	Surat dari pelbagai daerah Djakarta.	Tuntutan penurunan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
No. 1 diteruskan kepada Seksi A.				
2.	5/10	1781	Kem. Pertanian R.I. Djakarta No. 12844/M.	Agas. 152 D.P.P.R.I./55 Pabrik Gula Kenastran
3.	3/10	17843	G. Purba Merek Raja.	Penjelasan bebas tanah H. Colenbrander yang dibeli oleh Gadjin c.s.
4.	1/10	17848	S.B. Djaw. Pertanian Rakjat Tjib. Kabupaten Lamongan	Resolusi tentang Pupuk, obat-obatan, dan alat produksi Tani.
5.	15/9	17849	D.P. Harini Tjibang B.T.I. Pematang No. 562/II/55.	Formulering protes D.P.T.-B.T.I. Pemulang terhadap Djawatan Kehutanan Pemulang tanggal 27.11.54 No. 561/Sosok/II/55 terlampir.
No. 2 sd 5 diteruskan kepada Seksi C.				
6.	26/9	17844	Menteri P.U. & T., Djakarta. No. G.K.10/54 12 31.	Salinan surat keputusan Menteri P.U.T. tentang mendahului pengesahan Anggaran Belanja R.I. tahun 1955 memberi kuasa untuk melakukan pembayaran-pembayaran guna keperluan perlengkapan dan perbaikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Djalan Dr Wahidin Djakarta.
7.	4/10	17845	Idem No. Bpu 46/55.	S.d.a. tentang pemberhentian Drs Herman Kartowisastro dan Ir J.A.H. Ondang sebagai Komisaris Pemerintah Perusahaan N.V.M.E. W.A. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi D.				
8.	8/10	679T	Sarboesi Pemalang.	menuntut terlaksananya pgg baru menurut ketentuan panitia sorowidjo dan berlaku mulai 1 Januari 1955 dan jika supaya itu serta duduk dalam komisi pelaksanaan tik
9.	6/10	17815	Djawatan Transmigrasi Pusat (Kem. Sosial), Djakarta. No. AE/1875/527.	Menjampaikan 10 buku Ichisar Statistik Laporan tahun 1954.
10.	5/10	17820	Kantor Sosial Daerah Karesidenan Tjirebon. No. 2678/BU/II.	Berita Sosial No. 126 tahun ke-III
11.	8/10	17823	P.B. S.B. P.T.T. Bandung. No. 72/UPB.	Penerimaan sambutan Kongres Hudi
12.	5/10	17826	P.B. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Surakarta. No. 49/PB/55.	Pengiriman-pengiriman salinan surat dari Jaw Transing The Union Book Co. Medan.
13.	6/10	17830	S. Hadiwodjojo, Pangka.	Pernyataan mengenai pemerjatan terhadap diri S. Hadiwodjojo dan Sorwardji harus ditaja dengan tidak bersjant.
14.	30/9	17839	Kesatuan Buruh Kerakpulan Indonesia D.P.T. Djombang. No. 37/KBRI Dg 55	Uslu pengangkutan Mendor Djaka D.P.U. Plova Saudara Kasmadar.
15.	23/9	17847	D.P. Basia S.B. Kependjarian Tuban No. 139/V Bpu Tahun 55	Pernyataan mengenai masalah Perburuhan.
No. 8 sd 15 diteruskan kepada Seksi E.				
No. 12 diteruskan juga kepada Seksi E. dan				
No. 15 diteruskan juga kepada Seksi H.				
16.	—	17818	Kromo, Banjuwangi.	Saran-saran dari Kromo, supaya Pemerintah memberantas semua kaki tangan Belanda yang hendak mengatjaukan.
17.	7/10	17819	Soeprapto Prodjosuwono, Tegal.	Tidak dapat membenarkan sikap apathies Pemerintah terhadap para pegawainya terutama Pegawai-pegawai Djawatan-djawatan Penerangan.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 10 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	5/10	17825	Bekas Pedijana Bersendjata di Sumberdajana, Lampung Utara, Sumatera Selatan, Sumberdajana.	Tidak dapat menjetudui atas kepindahannya Saudara Mr Gele Haroen sebagai Residen Lampung.
19.	30/9	17828	Panitia Pemilihan Kabi Nerau Tandjung Redeb. No. 103/PP.Bab.1955.	Daftar surat keputusan dari Panitia Pemilihan Kabupaten Berau di Tandjung Redeb, tanggal 9-9-55 No. 11/PP.KAB.A.
20.	6/10	17831	P.D. SB KB Djawa Barat, Bandung	Pernyataan tentang pelaksanaan hasil-hasil Pemilihan Umum.
21.	6/10	17836	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor, Kupang	Pendjelasan Anggaran D.P.R.D. Timor Saudara M. Taks mengenai Mos Pembela Rakyat
22.	5/10	17837	No. 3205 I.E. Sekertaris P.P.S Bogor	Swapradja Kolana. Pegawai Pamong Pradja yang merangkap dengan pekerjaan Sekertaris P.P.S. mohon diberi wazny honorarium.
23.	6/10	17851	D.P.T. Sekupri Tandjung Kuning No. 151.1.14955	Bantuan terhadap berita yang dimarkas oleh Harian Merdeka tertanggal 26-9-55 mengenai kepindahan Mr Gele Haroen, Residen Lampung.
24.	10/10	17852 21 surat	Surat dari pelbagai daerah Dja karta.	1 Timunan didemilalonerkanu Kabinot S H 2 Mendukung Pantja Dharma
No. 16 s.d 21 diteruskan kepada Seksi C.				
25.	3/10	17799	Kem. Kebakimaa R.L., Djakarta. No. JA. 9/2549.	Surat Edaran tentang Pemindahan hak tanah dan lain-lain menurut Undang-undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954 No. 78).
26.	4/10	17800	Idem. No. JC.549/24. Seno, Dolak III.	Perkara H. Tambih dan lain-lain (Pembunuhan A. Abu Gorali).
27.	15/9	17824	M. Zen Gani, Pajakumbuh.	Menuntut supaya Tuan Ferdinand dihukum setimpal dengan perbuatannya.
28.	7/10	17829	No. 615/II/55.	Minta peninjauan kembali putusan putus persengkataan No. 22/1945 Pengadilan Negeri Talu.
29.	14/9	17840	Selamat, Kampung Tiga.	Melaporkan dari hal penipuan berc. Lurah Kampung Tiga Ketjamatan Bandar.
No. 25 s.d 29 diteruskan kepada Seksi H.				
30.	5/10	17846	S.B. Kem. Pertahanan Dewan Ranting P.A.L. Tiabong Surabaya. No. 050/A/IRT/1955. No. 30 diteruskan kepada Seksi L.	A. Utjapan selamat dari Utjory Takun ke-X, ngkatan Perang P I

Daftar surat-surat masuk (tgl. 11 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	27/9	17888	D.P.R.D.S. Kota Ketil Sukabumi.	Mosi persetujuan mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Garut tertanggal 29/12-54 No. 23/55 D.P.R.D.
2.	19/9	17890	Idem No. 19/1955.	Sda. mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Cirebon tertanggal 21/2-55 No. 10 D.P.R./1955.
3.	27/9	17892	D.P.R.D.S. Kota Ketil Sukabumi.	Mosi persetujuan mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Garut tanggal 31 Maret 1955 No. 26 D.P.R.D.
4.	27/9	17893	Idem. No. 26/1955	Sda. mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Kertamen tertanggal 28-4-55 No. 4/KNDP RD./1955
No. 1 dan 4 diteruskan kepada Sekel A.				
5.	6/10	17879	Kementerian PU dan T. Dir. karta.	Membebaskan D.P.D. Saughe/Toland dari larangan dalam pasal 1 ayat (1) dari Ordonansi dalam Staatsblad 1890.
6.	6/10	17880	Idem. No. Ter 24/55.	Idem.
No. 5 dan 6 diteruskan kepada Sekel D.				
7.	27/9	17882	D.P.R.D.S. Kota Ketil Sukabumi.	Mosi persetujuan mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Bodjonegoro tertanggal 1-6-55 No. 10/1955.
8.	7/10	17887	Panitia Perhubungan Dokter M. W. Joppig Kab. Lampung Selatan Tandjung Karang	Pernyataan supaya Dokter MW Joppig atas kepindahannya supaya diundian kembali.
9.	—	17894	D.P.R.D. Kota Ketil Sukabumi. No. 1/1955	Mosi persetujuan mengenai Resolusi D.P.R.D.S. Kabupaten Krawang tertanggal 7-10-54 No. 1/Kep D.P.R./1955.
No. 9 diteruskan kepada Sekel E.				
10.	27/9	17891	D.P.R.D.S. Kota Ketil Sukabumi. No. 23/1955.	Mosi persetujuan mengenai mosi D.P.R.D.S. Kabupaten Garut tertanggal 31/1-55 No. 1/55 D.P.R.D.
11.	19/9	17902	Kem. P.P. & K. Jakarta. No. 54704/CHI.	Pemangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas Pak. Hukun dan Pengawasan Majelis dan dan F. (Bronok) di Makassar.
No. 10 dan 11 diteruskan kepada Sekel E.				
12.	7/10	17884	S.B.K.B. Tjabang Surakarta. No. 125/So Tjb/VI-55.	Tuntutan mengenai tindakan perlakuan Kepala Exploitation DAMRI Jawa Tengah.
13.	20/9	17898	D.P.R. Sarbupri Dolok Ilir Serbalawan. No. 177/2/6/55.	Pemindahan tjatu buruh afd. 4 jang ngendon.
14.	3/10	17899	D.P.T. Sarbupri Banjuwangi. No. 372/B.III/2-206/Pernas/ DPT/55.	Protes terhadap tindakan Pengusaha C.O. Lian You.
15.	12/9	17905	Serikat Buruh Lajasan Perikanan Laut Ambon. No. 8/JPI	Agno. 14929 Tuntutan-tuntutan S.B.J.P.L. Ambon.
No. 12 dan 15 diteruskan kepada Sekel F.				
16.	—	680T 8 surat	Surat telegram dari pel. jang datang dari	Kabinet bb tidak mendapat dukungan dari rakyat dan menuntut kepada pemerintah agar kabinet bb segera dijabatkan demisioner rtk.
17.	8/10	17881	Kromo bin Asma, Banjuwangi.	Menerusi kerangka dan ketetapan
18.	6/10	17886	D.T. S.B. Kemperbu Jogjakarta. No. 4/1591-C/1955.	Pernyataan mengenai Kabinet Burhanuddin
19.	12/9	17897	D.P.R.-S.B. Kemperbu Djambi. No. 5/1/1955.	Harapan agar dijabatkan demisioner.
20.	—	17904 17 surat	Surat dari pelbagai daerah.	Pernyataan mengenai 24 partai politik organisasi di Djambi tanggal 1 September 1955.
Tuntutan supaya kabinet Burhanuddin Ha- rshap segera didemisionerkan.				
No. 16 dan 20 diteruskan kepada Sekel G.				

Daftar surat-surat masuk (tgl. 11 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
21	10/10	17871	Kedjaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia Djawatan Resersi Pusat, Djakarta. No. Kri 8297623.	Agno. 1001 Tuntutan Dr R.M. Abdoeikadir.
22	27/9	17889	Tembusan. D.P.R.D.S. Kota Ketjil Sukabumi. No. 20/1955.	Masi persetujuan mengenai Masi D.P.R.D.S. Kabupaten Garut tertanggal 29/12 54 No. 23/155 D.P.R.D.
No. 21 dan 22 diteruskan kepada Seksi H.				
23	8/10	17872	Presiden R.I., Djakarta No. 301 HK/1955.	Agno 14379 Tambahan terhadap rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah-daerah Otonomi Prop Daerah Istimewa Setingkat Prop Kabupaten Kota Besar dan Kota Ketjil di Djawa.
No. 23 akan dibat akan dalam rapat pleno.				
24	8/10	17907	Keta. Kesatuan R.I. Djakarta. No. 86364 Kab	Penjelasan pekerjaan perundang-undangan Kabinet yang lampau.
No. 24 akan diteruskan kepada Panitia Permusjawaratan.				

Daftar surat-surat masuk (tanggal 12 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Isi	Perihal
1.	28 9	17916	D.P.R.D.S. Kab. Lampung Selatan, Tandjung Karang Tembusan.	Agno. 17458. Mohon bantuan moreel demi kepentingan operasi dan untuk perbaikan kedudukan ekonomi.
No. 1 diteruskan kepada Seksi A.				
2.	1 10	17911	Menteri Kesehatan R.I. Djakarta. No. 85596/LII	Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tentang penjerahan kembali hak milik kekuasaan dan pengurusan atas Rumah Sakit "Surakarta" di Djehres Solo, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1955.
3.	4 10	17912	Idem. No. 86335/KS.	S.d.a. tentang membatalkan penundjukan Dr Med. E.W.K. My dan Dr Med. D.E. Büchler masing-masing sebagai Dokter pengudji sendiri di Padang Sidempuan dan Penjabungan sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan tanggal 6-1-1955 No. 918/K.S.
4.	4 10	17913	Idem. No. 86352/K.S.	S.d.a. tentang membatalkan surat keputusan tanggal 23 Agustus 1955 No. 72659/K.S.
5.	22 9	17917	Kem. PP. & K. Djakarta. No. 3085/Sek E/a.	Pembukaan Kursus Pegawai Administrasi (disingkat K.P.A.) di Palembang, Semarang dan Singaradja.
6.	1 10	17922	P.B. Persatuan Peladjar Sekolah Guru Antar Indonesia, Djakarta. No. 068/sec. P-B/PPSG/1955.	Pernyataan/desakan kepada Pemerintah supaya mempertinggi tondjangan Ikatan Dinas sesuai dengan kebutuhan dimasa sekarang.
7.	25 9	17923	S.B. Islam Indonesia, Djakarta. No. 38/K/RSUP/55.	Pernyataan penghargaan dan sokongan sepenuhnya terhadap kebidjaksanaan Menteri Kesehatan (Dr J. Leimena) yang telah memulihkan kembali kedudukan Saudara-saudara Dr Azir dan M. Peilouw.
No. 2 s.d 7 diteruskan kepada Seksi E.				
8.	4 10	17925	Kementerian Sosial R.I. Djakarta. No. Pol. 10-2-34.	Agno. 5999/D.P.R.R.I./55. Kegentingan disekitar perumahan Djalan Benteng (Surabaja).
No. 8 diteruskan kepada Seksi F.				
9.	— 10	682/T	34 surat telegram dari berbagai daerah.	memutus agar kabinet buhanuddin haruslah segera dinantikan demisioner ke
10.	— 10	683/T	Cedap Sitompul, Direktur Tambang Belerang, Mera Lintang.	harap diberikan penjelasan atas penji keputusan terhadap direktur sk bahwa kma kegalat dipepetu kma mohon didjaga keghusahan rakyat sk
11.	25 8	17921	Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo. No. U 11/1493a/DPD	Pemberian tondjangan peltuan bekas Anggota DPR
12.	12 10	17930	25 surat dari pelbagai daerah.	Tuntutan supaya Kabinet Buhanuddin haruslah didemisionerkan
No. 9 s.d 12 diteruskan kepada Seksi G.				
13.	3 10	17915	Gandut Tarakan	Mohon bantuan/pendjelasan tentang seorang tabanan yang telah bertahun-tahun
14.	7 10	17924	Himpunan Pembangunan Ekonomi Waditra Indonesia Djabar Bandung. No. 68 026 HPLUNI 058	Penghinaan sk. "Keng Po" mengenai Pemi-liaan Umum
No. 13 dan 14 diteruskan kepada Seksi H.				
15.	29	17814	Kementerian Perumahan Djakarta. No. KP 1544 P / dmd 51 Tembusan	Keistimewaan pangkat tanda jasa dan hak gadji yang belum diterima bagi Ltd. Bag M. Ritonga
No. 15 diteruskan kepada Seksi I.				

Rapat 80.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 12 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
16.	12/10	17820	Tsay Wen Anggota Parlemen, Djakarta	Pertanyaan kepada Pemerintah mengenai be- rita bahwa seorang bernama Charles Tambu akan dibawa oleh Wk. Presiden dalam rombo- nyannya yang akan mengunjungi ke India da- lam ts

No 16 akan diteruskan kepada Pemerintah.



Rapat 80.

Daftar surat-surat masuk (tanggal 13 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dirjen	Perihal
1.	10/10	17973	Puay Pemberantasan Pengang-guran Djawa Timur, Sidoardjo. No. 115 TP 55. Tembusan No. 1 diteruskan kepada Sekel	Systeem monopoli. A.
2.	10/10	17970	D.T. S.B.G. Pemalang, Sumber-hardjo. No. 338 U. Tembusan a. 2 diteruskan kepada Sekel B N	Peringatan terhadap budikan Kepala Djawa dan Tjaka III, Surabaya.
3.	10/10	17978	Panitia Peringkat Tanah Perma-mahan Rakjat Tj. Blata Tembusan	M lion nyera dapat perhatian dari Pemeris tak inah peramshan rakjat.
4.	30.9	17983	D.P.R.D.S. Kab. Lampung Se-lutan Tandjungkurang. No. 994 DOR 55 Tembusan	Agas 16913. Resolusi m nterudja resolusi D.P.R.D.S.Kab. Ngawi pada tanggal 30 Agu-tur 1955 177.D.D.PRDS 55. No.
5.	8/10	17988	R.K. Kapsari, Surabaya	Memohon perlindungan tentang bertempal llinggal.
6.	10/10	17989	M. Sumatir di Per-mang Si-lutara. Tembusan No. 1 d 6 diteruskan kepada Sekel C	Mengachiri perdjandjian sewa tanah, berhu-bung dan dibagi-bagikan kepada penduduk untuk rupa perumahan.
7.	6/10	17976	S.B. Penerbangan Tjahang Dj-karta. No. SIBP DAK 29 55 No. 7 diteruskan kepada Seksi D.	Pendicjiaan pernyataan tentang beleid Pim-pinan Presiden Direktur Gaa NV. Ir M Su-jato.
8.	4/10	17965	Djawatan Pendidikan Masjara-kat Kem. P.P. & K. Djakarta. No. 7039.Sek 8 55.	Mengangkat Saudara Mr Tjia Kok Tjiang. Pemimpin K.K.M.C di Makasar sebagai peng-ganti Saudara Mukdan, guru pada K.K.M.C di Makasar yang telah mengundarkan diri da-lam mata peladjaran Pengantar Hukum.
9.	5/10	17972	P.B. Per-anan Guru Tehnik Indonesia, Bandung No. 1339 C 55 Tembusan	Menjampaikan usul rangka susunan djawat-an Pendidikan Teknik
10.	8/10	17977	Sumarna, Djakarta Tembusan	Sebuah artikel pemandangan dari pembatja untuk dimuat dalam surat-surat kabar.
11.	13/10	17986	Kementerian PP dan K. Dja-karta. No. 99 Ekspedisi	Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 15-9-1955 No. 4652/B/III " 26-9-1955 No. 4900/B/III " 22-9-1955 No. 4839/B/III " 15-9-1955 No. 4654/B/III " 26-9-1955 No. 4889/B/III " 15-9-1955 No. 4653/B/III " 20-9-1955 No. 4759/B/III Peraturan Akademi Biologi di Bogor.
12.	7/10	17987	Kementerian Perumahan Djakar-ta. No. 99 Ekspedisi	Undang-undang Rehabilitasi Penderita Tja-pad.
13.	13/10	18008	Pusat I.P.T.L. Djakar-ta. No. 394 80 C Sekl Pa 55. Tembusan No. 1 d 11 diteruskan kepada Sekel E. No. 13 diteruskan juga kepada Sekel I. dan E.	
14.	185/T		Dari pelbagai daerah (22 surat).	medionit supaja kabinet bh dibubarkan ttk

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
15.	10/10	17981	D.P.R.D. Sementara Kota Besar Surabaya. No. 3501/55.	Usul Most D.P.R.D.S. Kota Besar Surabaya tanggal 14-9-1955 No. 72/D.P.R.D.S. tentang desakan kepada Pemerintah Pusat segera menghapuskan sistim pemberian subsidi tiap-tiap tahun kepada daerah-daerah otonom seluruh Indonesia umumnya. Agno. 16915. Resolusi menyetujui resolusi D.P.R.D.S. Kabupaten Ngawi pada tanggal 30 Agustus 1955 No. 17.U/D.P.R.D./14. Agno. 16914. Resolusi menyetujui resolusi D.P.R.D.S. Kabupaten Ngawi pada tanggal 30 Agustus 1955 No. 17.U/D.P.R.D.S./16. Permohonan agar kepindahan Residen Lampung Mr Gele Harun ditinjau kembali.
16.	30/9	17982	D.P.R.D.S. Kabupaten Lampung Selatan, Tandjungkarang. No. 594/Dpr/55. Tembusan.	
17.	30/9	17984	D.P.R.D.S. Kabupaten Lampung Selatan, Tandjungkarang. No. 592/Dpr/55. Tembusan.	
18.	12/10	17990	Halimah Ishak, Ketua Persatuan Kaum Ibu Islam Indonesia Telok Betung, Lampung, Sumatera Selatan.	
19.	—	17998	41 surat dari pelbagai daerah.	1. tuntutan supaya parlemen sementara dan kabinet Burhanuddin Harahap di-demislo-nerkan. 2. tuntutan supaya harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari diturunkan.

No. 14 & 19 diteruskan kepada Seksi G;

No. 19 diteruskan juga kepada Seksi A.

20.	10/10	17947	Pernyataan Wartawan Indonesia Tjebang Makasar Tembusan.	Pernyataan tidak membenarkan tindakan penahanan Pemimpin Redaksi Harian "Pedoman Rakjat" dan mendesak supaya segera membebaskan Pimpinan Redaksi Harian tsb.
21.	3/10	17955	Kabinet Perdana Menteri D K.H.L.	Kep. P.M. R.I. No. 284/P.M./1955 tentang melarang penerbitan-penerbitan yang dituntaskan dalam lampiran dari keputusan ini dimasukkan ke dan diedarkan diwilayah Indonesia.
22.	10/7	17963	S.S. Kehakiman Tjebang Pulu- kumbuh No. 49/SSK	Menjokong sepenuhnya resolusi dari P.B. Ikatan Panitera yang diadakan di Pati tanggal 7 April 1955 dan mendesak untuk memperbincangkan dalam kongres S.S.K. seluruh Indonesia bulan Oktober 1955 kepada Pemerintah.
23.	6/10	17968	D.P.T. Soeharto Bangw-anj No. 969 Soe III. A DPT 352 Tindakan	Penolakan Tuan C.P. Goereo untuk kembali ke Indonesia yang sedang melakukan tjiuti di Negeri Belanda.
24.	12/10	17980	Dato bin T.B. Aslam, Kb Ke- lupa, Palmarah, Djakarta Tembusan	Surat permohonan pengaduan terhadap dirinya seorang laki-laki yang sekarang mendjabat Komandan Polisi di Seksi VIII Kota Baru bernama Popon Suminta tempat tinggal di Kebajoran.
25.	5/10	17991	Abmadun bin Almadun, Beng- kuhi Selatan Tembusan	Mohon dibebaskan dari hukuman badan.

No. 20 s/d 25 diteruskan kepada Seksi H.

26.	27/9	17962	Kantor Pusat Ke-atuan Pensiun Indonesi (K.P.I.) Daerah Sula- west, Tondana	Pernyataan menjokong penuh beleid dari Ket-ua Koordinasi Keamanan Daerah Prop. Sul. Kolonel J.P. Warouw.
27.	7/10	17985	Pedjuang Kemerdekaan Sula- wi Utara, Manado.	Pernyataan mengenai kemungkinan Panglima T.T. VII Kol. J.P. Warouw termasuk juga Kmd. R.I. 24 Overste H.V. Worang akan di-mutasikan.

No. 26 dan 27 diteruskan kepada Seksi I.

Rapat 80.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 13 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
28.	12/10	18002	Presiden R.I., Djakarta. No. 3144/HK/55.	Rantjangan Undang-undang tentang penctap- an Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 53) tentang perpan- dangan diangka waktu berakunya peraturan- peraturan daerah yang dimatikan dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa sebagai Undang-undang).

No. 28 akan dibatjakan dalam rapat pleno.

